

# RENCANA STRATEGIS

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN PONOROGO



**TAHUN 2025-2029**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo bisa diselesaikan.

Rencana Strategis lima tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo ini adalah sebagai pedoman bagi pencapaian tujuan organisasi baik jangka pendek maupun jangka menengah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Ponorogo maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo untuk mencapai tujuannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk membuat dokumen perencanaan pembangunan yang memberi arah / strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis mengenai kebijakan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis (Renstra) dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo telah dijabarkan dalam rencana kinerja tahun 2025 – 2029 sebagai komitmen pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja tahun 2025 – 2029.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini masih jauh dari sempurna, sehingga kami mengharapkan adanya pembenahan atau perbaikan di kemudian hari guna kesempurnaan pembuatan Rencana Strategis (Renstra) ini.

Besar harapan kami semoga Renstra ini memberikan manfaat menjadi pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan bagi aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo.

Ponorogo, September 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Ponorogo



Dra. Besse Tennisampeang, M.Si.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP 196805121990092002

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 bahwa penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang disebut dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 yang merupakan salah satu tahapan sistem perencanaan pembangunan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 Visi Pembangunan Tahun 2025 – 2029 Kabupaten Ponorogo adalah “Mewujudkan Ponorogo HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Bertaqwa)”. Sedangkan Misi Pembangunan Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

- Misi 1 Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial;
- Misi 2 Transformasi Ekonomi Dalam Rangka Penguatan UMKM, Koperasi BUMD dan BUMDes Melalui Riset Inovasi, Implementasi Ekonomi Hijau, Transformasi Digital, Integrasi Ekonomi Wilayah serta Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja;
- Misi 3 Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi;

Misi 4 Transformasi Tata Kelola Untuk Mewujudkan Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, Inklusif, Bermanfaat, serta Berdampak Secara Sosial dan Ekonomi Berbasis Revolusi Teknologi Informasi;

Misi 5 Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dengan Pendekatan Konektivitas untuk Mendukung Kawasan Strategis dan Pemerataan Pembangunan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo merupakan Perangkat Daerah yang memiliki tugas untuk melaksanakan program pembangunan guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Program Pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo adalah program yang mendukung Misi 3 yaitu “Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi”.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo merupakan program kerja dengan langkah-langkah kebijakan dalam mencapai tujuan. Langkah kebijakan itu merupakan strategi untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam program lima tahun kedepan, serta dengan memperhatikan skala prioritas.

Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mendukung tercapainya sasaran yang ditetapkan adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan urusan kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pelaksanaan administrasi badan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Perencanaan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Ponorogo merupakan instrumen untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam periode lima tahun ke depan, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di pandang perlu untuk di sesuaikan. Dokumen Renstra berfungsi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini.

Dengan adanya Renstra tersebut maka setiap aparatur Perangkat Daerah akan memiliki panduan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan sasaran dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun ke depan.

Selain itu Renstra SKPD juga merupakan instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Penetapan skala prioritas tersebut dimaksudkan untuk dapat mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dan sekaligus untuk mencapai kondisi / keadaan ideal yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Dalam kerangka mewujudkan hal tersebut di atas, perlu adanya dukungan yang melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) utamanya dalam pelaksanaan tahapan perencanaan dan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai pemberi amanah sehingga prinsip-prinsip pemerintahan (*Good Governance*) dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan melalui tiga pilar utamanya yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas akan terwujud dan berjalan dengan baik.

Renstra merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi. Dengan tersusunnya Renstra maka jelas bagi organisasi arah yang akan dituju.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026 disusun atas dasar :

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Presiden RI nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2024 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 (8) TLD Nomor 21);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
  17. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 12 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

## 1.3. Maksud dan Tujuan

### 1.3.1 Maksud

Perumusan Renstra dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program yang telah disusun, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, di mana suatu instansi pemerintah dituntut juga untuk melakukan perubahan-perubahan kearah perbaikan secara terus menerus. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Adapun manfaat Renstra yaitu :

1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Untuk pengelolaan keberhasilan, di mana Perencanaan strategik akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.
3. Perencanaan Strategik memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan dimasa mendatang (berorientasi pada masa depan).
4. Perencanaan Strategik yang fleksibel dengan pendekatan jangka panjang dapat untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada.
5. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, karena pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
6. Untuk meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan organisasi.

### 1.3.2 Tujuan

Tujuan Renstra yang disusun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan Visi dan Misi Daerah yang telah ditetapkan. Renstra merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi. Dengan tersusunnya Renstra maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dituju.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 – 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I. PENDAHULUAN,** memuat :

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

**BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH,** memuat :

- 2.1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
  - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah;
  - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; dan
  - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.
- 2.2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
  - 2.2.2 Isu Strategis.

**BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN,**  
memuat:

- 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029;
- 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029;
- 3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

**BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN,**  
memuat:

- 4.1. Uraian Program;
- 4.2. Uraian Kegiatan;
- 4.3. Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja Indikator, Target dan Pagu Indikatif;
- 4.4. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah;
- 4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan

**BAB V. PENUTUP**

## BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 2.1 Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

### 2.1.a Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pelaksanan administrasi badan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten Ponorogo terdiri dari :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat ;
- c. Bidang Kesatuan Bangsa ;
- d. Bidang Sosial Politik ;

## 1. Sekretariat

Mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Pelaksanaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan asset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sekretariat terdiri dari :

### 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan perusratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, asset serta pengelolaan kepegawaian.

## 2. Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan

Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, social dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program kerja dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah;
4. Pelaksanaan koordinasi dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran

kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah;

5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **3. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan**

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan

- politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
  4. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
  5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
  6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik**

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan

bidang kewaspadaan serta penanganan konflik.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah daerah;
2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah daerah;
4. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah daerah;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah daerah; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

### 2.1.b Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ponorogo didukung personil sebanyak 31 orang, terdiri dari :

▪ Pejabat Struktural	:	20 Orang
▪ Staf/Fungsional umum	:	9 Orang
▪ Non ASN	:	2 Orang

Berdasarkan latar belakang pendidikannya, sebagian besar Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ponorogo mempunyai pendidikan sebagai berikut :

#### 1) Menurut Golongan Kepangkatan

a. Golongan IV	:	8 orang
b. Golongan III	:	12 orang
c. Golongan II	:	9 orang
d. Golongan I	:	- orang
e. Honorer/Non PNS	:	2 orang
<b>Jumlah</b>	:	<b>31 orang</b>

#### 1) Menurut Pendidikan

a. PNS		
Strata 3	:	- orang
Strata 2	:	6 orang
Strata 1/D4	:	11 orang
Diploma	:	3 orang
SMA	:	11 orang
SMP	:	- orang
SD	:	- orang
<b>Jumlah</b>	:	<b>31 orang</b>

b. Honorer/Non PNS		
Strata 1/D4	:	- orang
Diploma	:	- orang
SMA	:	2 orang
<b>Jumlah</b>	:	<b>2 orang</b>

## 1. Sarana Prasarana

Sebagai penunjang operasional kelembagaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditunjang dengan sarana dan prasarana berupa alat transportasi, peralatan dan perlengkapan kantor. Adapun inventaris Badan sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1.	Tanah Bangunan Kantor	1	Buah
2.	Mobil	2	Unit
3.	Kendaraan Dinas roda 2	2	Unit
4.	AC	11	Unit
5.	Almari penyimpan arsip	7	Buah
6.	Mesin ketik elektrik	1	Buah
7.	Brankas	1	Buah
8.	Mesin penghancur kertas	1	Buah
9.	Lemari Es	1	Buah
10.	Dispenser	2	Buah
11.	PC unit	5	Unit
12.	Note Book	11	Buah
13.	Printer	11	Buah
14.	Server	1	Buah
15.	Proyektor	1	Buah
16.	Wireless Amplifier	1	Buah
17.	Meja rapat	12	Buah
18.	Kursi rapat	28	Buah
19.	Filling besi metal	4	Buah
20.	Scanner	2	Buah
21.	Kursi tamu di ruangan Pejabat Eselon II	1	Set
22.	Kursi tamu di ruangan Pejabat Eselon III	1	Set
23.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	Set

24.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	7	Set
25.	Meja Kerja Pegawai non struktural	20	Set
26.	Televisi	2	Buah
27.	Papan Nama Instansi	1	Buah

Sarana dan prasarana yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo sudah mencukupi untuk pelaksanaan program dan kegiatan. Namun untuk barang modal yang sudah ada perlu adanya pemeliharaan dan jika ada kerusakan yang dimungkinkan tidak dapat diperbaiki perlu adanya penggantian atau pembelian baru.

### 2.1.c Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan keanekaragaman etnik, suku, budaya, agama, dan bahasa, Ponorogo menjadi wadah bagi beragam kelompok kepentingan untuk menciptakan kultur toleran dengan berbagai ruang dan dimensi. Hal tersebut tentu saja membuat situasi toleransi di Kabupaten Ponorogo menuai beragam tantangan. Benturan budaya dan paham antar kelompok masyarakat serta perbedaan yang sering menimbulkan ketegangan sosial. Pada tingkat ekstrem, terkadang benturan tersebut yang berakibat terjadinya perpecahan dan konflik sosial.

Sebagai upaya mengurangi dampak negatif paham intoleransi, membangun kecerdasan emosi dan spiritual termasuk *local wisdom* yang menjadi bagian dari budaya yang harus terus dilaksanakan. Pembangunan fisik Kabupaten Ponorogo merupakan hal yang penting, namun alangkah baiknya untuk tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur melainkan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan

tetap menjaga budaya dan karakter kebangsaan. Kedepan, pendidikan dengan basis multikultural perlu dikembangkan terutama di tingkat pendidikan formal yaitu sekolah. Hal tersebut diharapkan dapat dimanifestasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang sesuai dengan tingkatan pendidikan yang ada.

Tantangan di era globalisasi dan kemudahan akses informasi mempengaruhi kondisi ideologi kebangsaan dan rasa cinta tanah air khususnya di kalangan generasi muda. Tahun 2024 merupakan tahun pertama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo menjadi instansi yang mengampu kegiatan paskibraka mulai dari seleksi sampai pelatihan. Paskibraka merupakan salah satu kegiatan pembentukan karakter patriotisme, disiplin, dan pengabdian kepada negara. Generasi muda yang aktif dalam paskibraka bukan hanya memahami prosedur pengibaran bendera yang benar melainkan menghayati secara mendalam nilai-nilai perjuangan dan persatuan yang terkandung dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia serta menjadikan generasi muda sebagai pionir kesadaran berbangsa dengan semangat nasionalisme di tengah lunturnya pemahaman ideologi Pancasila pada sebagian besar generasi muda yang lebih tertarik dengan budaya global.

Konsekuensi lain dari banyaknya pengaruh luar akibat kemajuan teknologi mengakibatkan terjadinya kompleksitas permasalahan dimana semakin rawannya bahaya peredaran narkoba yang multidimensi dan kompleks karena berkaitan dengan permasalahan hukum, keamanan negara, kesehatan, ekonomi maupun sosial. Kejahatan narkoba merupakan

kejahatan terorganisir (*organized crime*), kejahatan lintas negara (*transnational crime*), dan bagian dari *proxy war* yang dapat menghancurkan ideologi bangsa dan ketahanan nasional. Selama tahun 2024, menurut data Satresnarkoba Polres Kabupaten Ponorogo terdapat 68 kasus narkoba dengan jumlah tersangka sebanyak 58. Berdasarkan jumlah kasus dan tersangka, angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 9% dibandingkan dengan tahun 2023 namun mengalami kenaikan pada jumlah barang bukti. Oleh sebab itu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2025 adalah menyelenggarakan sosialisasi bahaya narkoba kepada generasi muda (pelajar SMA/SMK) di Kabupaten Ponorogo.

Di sisi lain, penyelenggaraan pemilihan umum serentak 2024 merupakan salah satu tantangan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik guna menciptakan pemilihan umum yang kondusif dan partisipatif. Beberapa isu yang menjadi hambatan dan tantangan dalam eskalasi politik di wilayah Kabupaten Ponorogo yakni adanya penyebaran praktik politik identitas (paham yang mengutamakan kepentingan kelompok dengan didasari oleh kesamaan identitas, seperti agama, gender, budaya, dan lain-lain); penyebaran berita bohong (*hoax*); serta ujaran kebencian yang diungkapkan dalam bentuk foto, gambar, ilustrasi, meme dan kata-kata yang memiliki konotasi provokasi, penghinaan dan hasutan kepada individu maupun pejabat publik.

Tantangan semakin besar karena semakin

menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Lembaga Eksekutif dan Legislatif. Terlebih angka kecenderungan pengguna internet dalam penyebaran berita hoax terus mengalami peningkatan. Hoax merupakan aspek yang sudah menjadi bagian dari politik dan tidak dapat dipisahkan. Oleh sebab itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara massif memberikan sosialisasi terkait pemilihan umum kepada beberapa lapisan masyarakat seperti generasi muda, tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Ponorogo mulai dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024.

Pada aspek persatuan dan kesatuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tugas dan peran penting dalam menjaga stabilitas persatuan dan kesatuan khususnya di wilayah Kabupaten Ponorogo. Hal yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius dari kalangan pemerintah maupun pihak-pihak terkait guna tetap menjaga masyarakat yang memiliki budi pekerti luhur yang berwawasan serta memiliki jiwa kebangsaan yang tinggi.

Upaya cipta kondusif daerah Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga menjadi salah satu prioritas utama. Melakukan monitoring dan pengawasan apabila terjadi kegiatan demonstrasi dalam rangka cegah dini dan deteksi dini potensi konflik. Penguatan dan sinergi dengan beberapa instansi terkait juga merupakan upaya menjaga stabilitas dan kondusivitas.

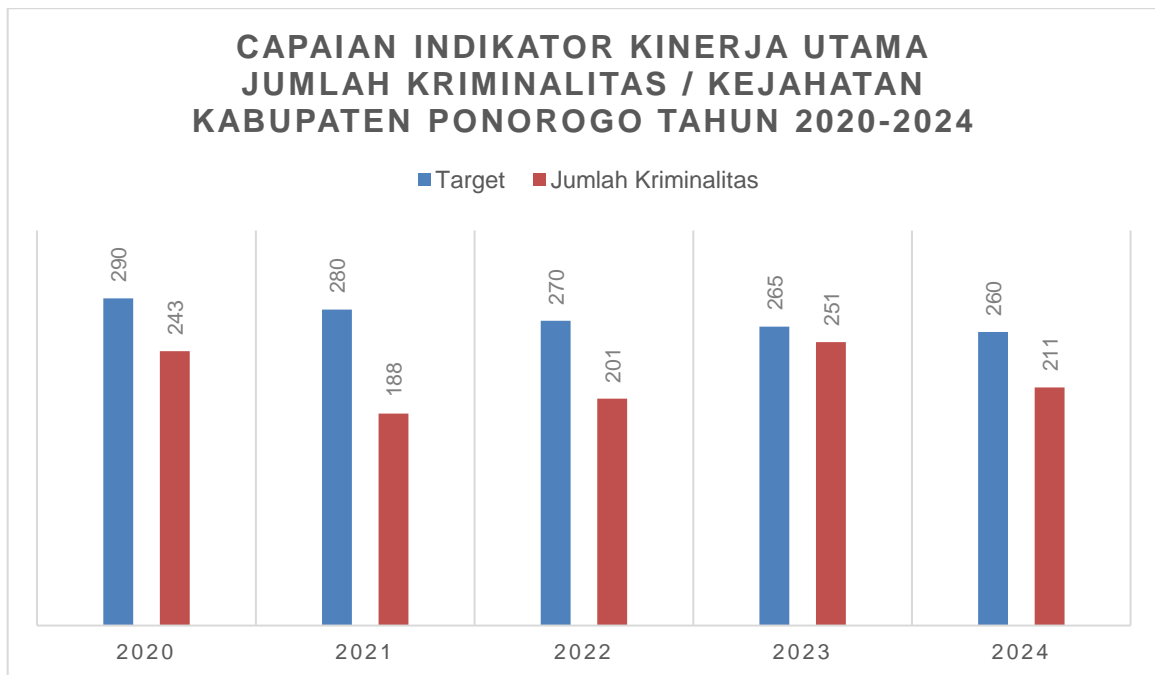
Sebagai upaya mewujudkan pelayanan prima dalam bentuk pelayanan publik yang diemban Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo adalah pemberian rekomendasi izin penelitian / survei dari lembaga, perguruan tinggi dan pihak-pihak yang memerlukan izin penelitian.

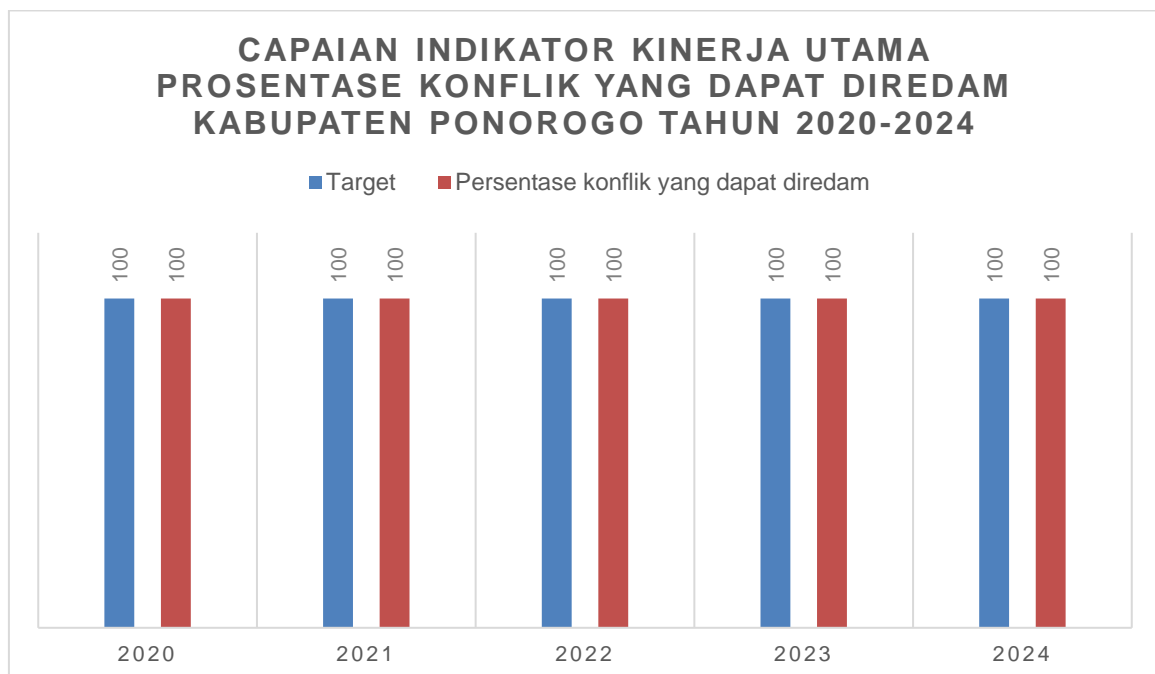
Untuk mendukung tercapainya pelayanan yang optimal maka ditempuh dengan beberapa program. Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemsyarakatan;
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

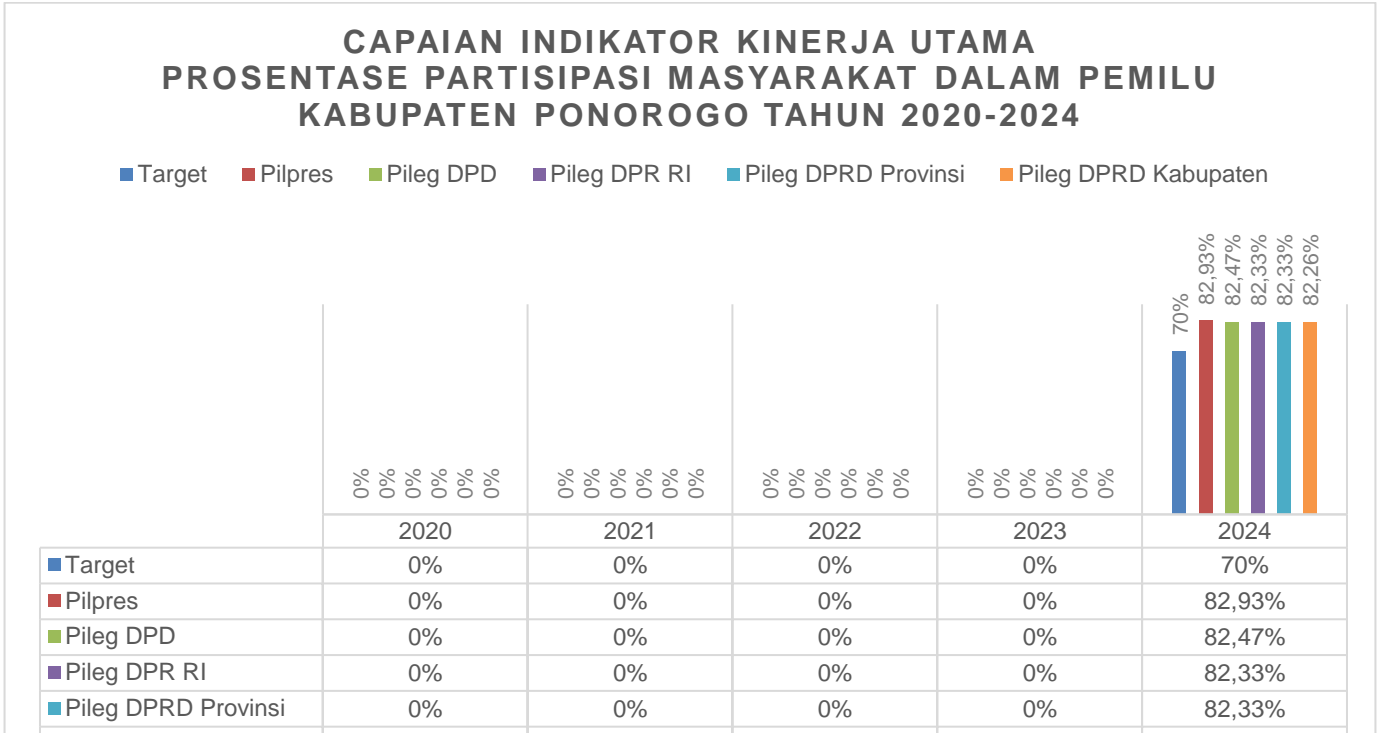
Pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan selama 5 (lima) tahun yang diutamakan berkaitan dengan capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo. Terdapat 2 (dua) indikator yaitu Angka Kriminalitas dan Prosentase Konflik Sosial yang Diselesaikan. Capaian target kinerja selama tahun 2020-2024 adalah:



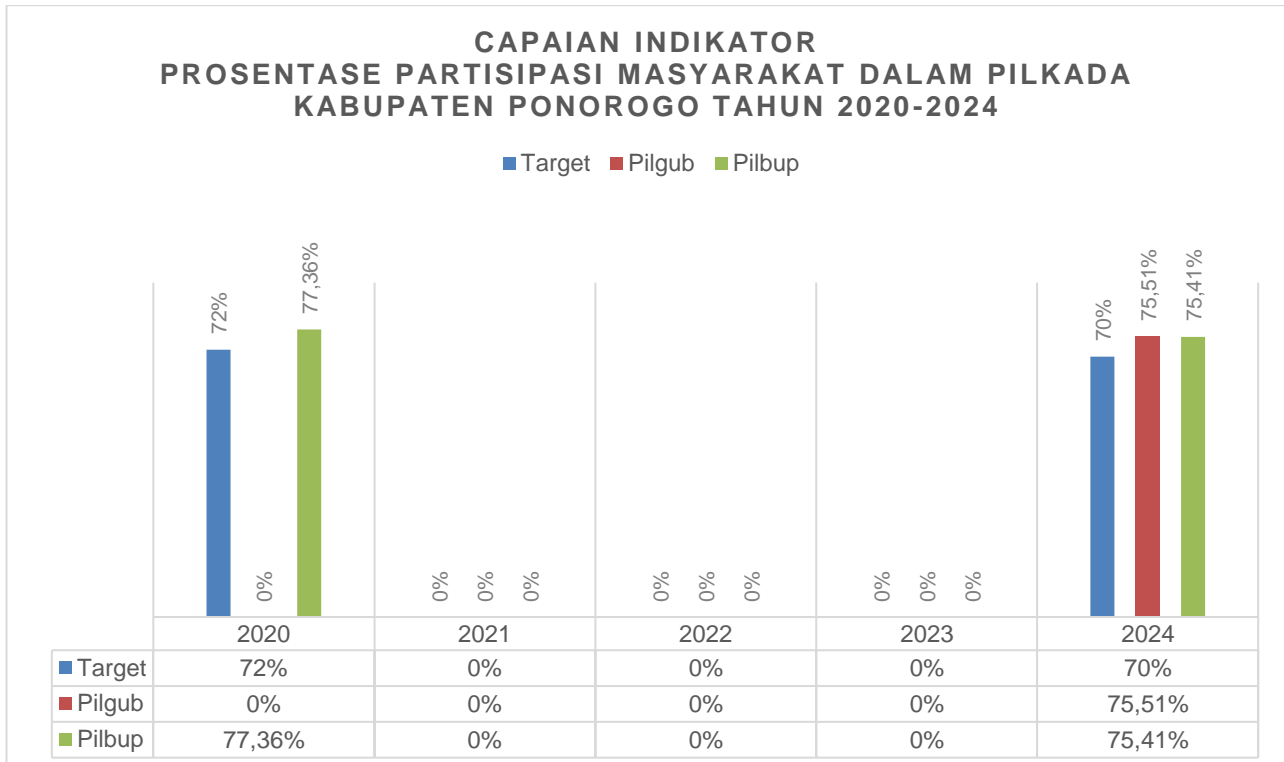
Grafik 2.1 Capaian Indikator Jumlah Kriminalitas / Kejahatan Tahun 2020-2024



Grafik 2.2 Capaian Indikator Prosentase Konflik yang Dapat Diredam Tahun 2020-2024



Grafik 2.3 Capaian Indikator Prosentase Partisipasi Partai Politik dalam Pemilu Tahun 2020-2024



Grafik 2.4 Capaian Indikator Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Tahun 2020-2024

#### **2.1.d Kelompok Sasaran Layanan**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo, yang menjadi kelompok sasaran layanan adalah :

1. Partai Politik;
2. Organisasi Kemasyarakatan;
3. Generasi Muda / Calon Paskibra; dan
4. Masyarakat.

#### **2.1.e Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan**

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan kegiatan fasilitasi forum-forum kemitraan yang dibentuk dalam rangka terwujudnya tujuan “Menjaga kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia, kelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan” dengan sasaran “Terciptanya kondisi masyarakat yang tenteram, tertib, aman dan harmonis”. Forum kemitraan ini terdiri atas:

1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
2. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
3. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda);  
dan
5. Forum Komunikasi Pencak Silat dan Bela Diri (FKPSB).

Dalam pelaksanaan peran dan fungsi forum-forum

tersebut, perlu adanya penguatan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan agar keberadaan forum kemitraan benar-benar mampu memberikan kontribusi secara nyata dalam menjaga stabilitas situasi daerah dan kondusivitas wilayah Kabupaten Ponorogo.

## **2.2 Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **2.2.a Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo dalam menjaga stabilitas situasi dan kondusivitas wilayah Kabupaten Ponorogo dalam aspek keamanan, ketertiban, persatuan dan kesatuan menjadi prioritas utama. Penciptaan situasi dan kondisi yang kondusif adalah hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan tugas.

Hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketentraman di masyarakat harus bisa diantisipasi sedini mungkin guna mencegah timbulnya perpecahan yang mengarah pada kondisi disintegrasi bangsa. Salah satu aspek yang mempengaruhi adalah kurangnya pemahaman wawasan kebangsaan, toleransi umat beragama serta revolusi gaya hidup akibat globalisasi. Kurangnya aktualisasi bela negara di masyarakat dan masih minimnya pembauran kebangsaan intra dan antar suku, kelompok budaya dan umat beragama menjadi faktor utama permasalahan diatas.

Pengaruh kemajuan teknologi berdampak pada semakin rawannya bahaya peredaran narkoba khususnya kepada generasi muda. Permasalahan terkait narkoba merupakan masalah yang multidimensi dan kompleks karena berkaitan dengan permasalahan hukum, keamanan negara, kesehatan, ekonomi maupun sosial.

Berdasarkan aspek politik masih terdapat praktik politik negatif dan praktis disaat pesta demokrasi Pemilu dan Pilkada. Hal ini dikarenakan kurangnya penyebaran informasi implementasi peraturan perundang-undangan dalam peningkatan etika budaya politik. Selain itu, peran stakeholder dirasa kurang dalam peningkatan pemahaman politik di masyarakat.

Munculnya organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat yang semakin banyak dikawasan Kabupaten Ponorogo juga sangat perlu menjadi perhatian khusus utamanya dalam pembinaan dan pengawasannya agar dalam pelaksanaan tugasnya bisa seiring sejalan dengan pemerintahan dan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Belum adanya sistem pelaporan intelijen terpadu terintegrasi dalam upaya peningkatan kewaspadaan daerah deteksi dini dan cegah dini konflik sosial. Selain itu, kurang maksimalnya Rencana Aksi Terpadu Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial. Hal ini harus diberikan perhatian khusus sehingga tindakan preventif dapat dilakukan sebelum terjadinya benturan yang mengakibatkan konflik sosial di masyarakat.

### 2.2.b Isu Strategis

Bangsa Indonesia dibangun atas kemajemukan sehingga memiliki potensi yang tinggi terhadap kerawanan sosial, politik, dan kewilayahan yang dapat mengarah pada timbulnya konflik sosial yang berdimensi horizontal maupun vertikal. Selain itu masih terdapat beberapa permasalahan lainnya yang saling berkaitan seperti implementasi otonomi daerah yang belum tuntas, kebijakan publik yang belum mampu memuaskan masyarakat, kesenjangan sosial dan ekonomi, serta rendahnya penegakan hukum dan kesadaran hukum. Seluruh aspek di atas merupakan hambatan yang signifikan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan berpotensi terhadap disintegrasi bangsa.

Disamping fenomena faktual di atas, kondisi kehidupan masyarakat masih dihadapkan pada kurangnya kesadaran berdemokrasi dan berpolitik, kurangnya kesadaran akan toleransi sehingga berpengaruh terhadap semakin merosotnya indeks pembangunan manusia yang pada akhirnya menjadi salah satu aspek ancaman dalam mewujudkan ketahanan bangsa dan kehidupan masyarakat.

Memperhatikan situasi yang berkembang, dapat dikemukakan beberapa isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo, yaitu:

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Workshop Kebangsaan 4 Pilar untuk menangkal terjadinya radikalisme, terorisme dan intoleran</li> <li>Sosialisasi Kebangsaan (WASBANG) dengan tema Pencegahan Intoleransi, Radikalisme, dan Terorisme</li> </ul>	Kurangnya pemahaman dan akan wawasan kebangsaan masyarakat, toleransi umat beragama serta revolusi gaya hidup akibat globalisasi	Nihil	Penguatan kerjasama bilateral dengan beberapa negara dalam pembangunan negara dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum serta mengantisipasi potensi gesekan dalam masyarakat sebagai akibat arus informasi dan telekomunikasi global	Penguatan kerjasama stakeholder yang terlibat dalam pembangunan nasional dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum serta mengantisipasi potensi gesekan dalam masyarakat sebagai akibat arus informasi dan telekomunikasi global	Penguatan kerjasama stakeholder yang terlibat dalam pembangunan daerah dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum serta mengantisipasi potensi gesekan dalam masyarakat sebagai akibat arus informasi dan telekomunikasi global	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktualisasi nilai-nilai pancasila dalam menghadapi perubahan zaman yang semakin dinamis</li> <li>Penguatan wawasan kebangsaan, arti penting kepentingan bangsa, bela negara sesuai dengan perkembangan zaman</li> <li>Perlunya menjaga kerukunan umat beragama, keserasian dalam perbedaan baik suku, agama, bahasa, ras dan budaya</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi</li> </ul>	Bahaya peredaran	Nihil	Penguatan	Penguatan	Penguatan	Penanggulangan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
bahaya P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika)	narkoba pada generasi muda		kerjasama bilateral dengan beberapa negara dalam pembangunan negara dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum serta mengantisipasi potensi gesekan dalam masyarakat sebagai akibat arus informasi dan telekomunikasi global	kerjasama stakeholder yang terlibat dalam pembangunan nasional dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum serta mengantisipasi potensi gesekan dalam masyarakat sebagai akibat arus informasi dan telekomunikasi global	kerjasama stakeholder yang terlibat dalam pembangunan daerah dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum serta mengantisipasi potensi gesekan dalam masyarakat sebagai akibat arus informasi dan telekomunikasi global	penyalahgunaan narkotika yang mengancam kualitas generasi bangsa
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi Pemberdayaan dan pengawasan organisasi</li> </ul>	Rendahnya persentase organisasi masyarakat yang dinyatakan	Nihil	Penguatan kerjasama bilateral dengan	Penguatan kerjasama stakeholder yang terlibat	Penguatan kerjasama stakeholder yang terlibat	Peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<p>kemasyarakatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Digitalisasi layanan, dan pendekatan yang lebih akomodatif terhadap keragaman bentuk organisasi masyarakat Indonesia.</li> </ul>	terdaftar baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum		beberapa negara dalam pembangunan negara dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum serta mengantisipasi potensi gesekan dalam masyarakat sebagai akibat arus informasi dan telekomunikasi global	dalam pembangunan nasional dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum serta mengantisipasi potensi gesekan dalam masyarakat sebagai akibat arus informasi dan telekomunikasi global	dalam pembangunan daerah dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum serta mengantisipasi potensi gesekan dalam masyarakat sebagai akibat arus informasi dan telekomunikasi global	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi kepada partai politik terkait peningkatan fungsi partai politik sebagai sarana</li> </ul>	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilihan umum	Nihil	Penguatan kerjasama bilateral dengan beberapa negara dalam pembangunan	Penguatan kerjasama stakeholder yang terlibat dalam pembangunan nasional dalam	Penguatan kerjasama stakeholder yang terlibat dalam pembangunan daerah dalam	Peningkatan fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pendidikan politik anggota dan masyarakat			negara dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum serta mengantisipasi potensi gesekan dalam masyarakat sebagai akibat arus informasi dan telekomunikasi global	menjaga ketertiban dan ketentraman umum serta mengantisipasi potensi gesekan dalam masyarakat sebagai akibat arus informasi dan telekomunikasi global	menjaga ketertiban dan ketentraman umum serta mengantisipasi potensi gesekan dalam masyarakat sebagai akibat arus informasi dan telekomunikasi global	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Inovasi sistem pelaporan intelijen terpadu terintegrasi</li> </ul>	Belum adanya sistem pelaporan intelijen terpadu terintegrasi dalam upaya peningkatan kewaspadaan daerah deteksi dini dan cegah dini konflik sosial	Nihil	Penguatan kerjasama bilateral dengan beberapa negara dalam pembangunan negara dalam menjaga ketertiban dan	Penguatan kerjasama stakeholder yang terlibat dalam pembangunan nasional dalam menjaga ketertiban dan ketentraman	Penguatan kerjasama stakeholder yang terlibat dalam pembangunan daerah dalam menjaga ketertiban dan ketentraman	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan rasa aman, stabilitas keamanan untuk menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan</li> <li>Peningkatan koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait dan</li> </ul>

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			ketentraman umum serta mengantisipasi potensi gesekan dalam masyarakat sebagai akibat arus informasi dan telekomunikasi global	umum serta mengantisipasi potensi gesekan dalam masyarakat sebagai akibat arus informasi dan telekomunikasi global	umum serta mengantisipasi potensi gesekan dalam masyarakat sebagai akibat arus informasi dan telekomunikasi global	mitra forum

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1 Tujuan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 Visi Pembangunan Tahun 2025 – 2029 Kabupaten Ponorogo adalah “Mewujudkan Ponorogo HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Bertaqwa)”. Sedangkan Misi Pembangunan Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

- Misi 1 Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial;
- Misi 2 Transformasi Ekonomi Dalam Rangka Penguatan UMKM, Koperasi BUMD dan BUMDes Melalui Riset Inovasi, Implementasi Ekonomi Hijau, Transformasi Digital, Integrasi Ekonomi Wilayah serta Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja;
- Misi 3 Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi;
- Misi 4 Transformasi Tata Kelola Untuk Mewujudkan Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, Inklusif, Bermanfaat, serta Berdampak Secara Sosial dan Ekonomi Berbasis Revolusi Teknologi Informasi;
- Misi 5 Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dengan Pendekatan Konektivitas untuk Mendukung Kawasan Strategis dan Pemerataan Pembangunan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo merupakan Perangkat Daerah yang memiliki tugas untuk melaksanakan program pembangunan guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Program Pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo adalah program yang mendukung Misi 3 yaitu “Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi”. Selanjutnya, dukungan atas ketercapaian misi tersebut akan dimanifestasikan melalui upaya pemenuhan tujuan ke-3 (tiga) Kabupaten Ponorogo yakni “Menjaga kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia, kelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan”.

Berdasarkan tujuan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo menetapkan tujuan pada Renstra Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

**“Terciptanya kondisi masyarakat, yang tenteram, tertib, aman, dan harmonis”**

### **3.2 Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029**

Dalam upaya implementasi tujuan RPJMD “Menjaga, kelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan” Kabupaten Ponorogo memiliki sasaran RPJMD “Terciptanya kondisi masyarakat, yang tenteram, tertib, aman, dan harmonis”. Sasaran yang ada pada RPJMD akan menjadi tujuan renstra perangkat daerah.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 – 2029, ditetapkan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:

1. Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat; dan
2. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

**Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 – 2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terciptanya kondisi masyarakat, yang tenteram, tertib, aman, dan harmonis	Terciptanya kondisi masyarakat, yang tenteram, tertib, aman, dan harmonis		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,47	76,52	76,70	77	77,20	77,50	
		Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	84,92	85	85,08	85,16	85,24	85,32	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Angka Kriminalitas	26,08	25,56	25,05	24,54	24,03	23,52	
		Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	79,41	79,50	79,70	79,80	79,90	80	

### 3.3 Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029

Perumusan strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo disesuaikan dengan isu strategis dan rumusan tujuan dan sasaran Kabupaten Ponorogo untuk 5 (lima) tahun kedepan. Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

1. Melaksanakan program aktualisasi nilai-nilai pancasila dan pembauran kebangsaan;
2. Melaksanakan sosialisasi bahaya penggunaan narkoba;
3. Melaksanakan sosialisasi pencegahan paham radikalisme dan terorisme.
4. Melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat dan pengurus partai politik serta pemantauan, pelaporan dan evaluasi situasi politik di daerah;
5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat sebagai upaya optimalisasi peran organisasi kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Melaksanakan fasilitasi forum-forum mitra (FKUB, FKDM, FKPSB dan FPK);
7. Melaksanakan kegiatan pengendalian inflasi daerah;
8. Melaksanakan sinergitas kegiatan terpadu pelaporan aksi pencegahan dan penanganan konflik; dan
9. Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah sebagai salah satu prasyarat untuk terwujudnya pemerintahan yang akuntabel;

**Tabel 3.4 Penahapan Renstra  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo**

<b>TAHAP 1 (2026)</b>	<b>TAHAP 2 (2027)</b>	<b>TAHAP 3 (2028)</b>	<b>TAHAP 4 (2029)</b>	<b>TAHAP 5 (2030)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan potensi konflik dan kerawanan di wilayah Kabupaten Ponorogo;</li> <li>• Penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di tingkat Kecamatan;</li> <li>• Penguatan koordinasi lintas instansi dalam penanganan isu keamanan dan ketertiban.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);</li> <li>• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan;</li> <li>• Optimalisasi peran organisasi kemasyarakatan dalam menjaga stabilitas daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan inovasi pelayanan publik di bidang politik dan pemerintahan;</li> <li>• Pengembangan program pembauran dan harmonisasi sosial antar kelompok masyarakat;</li> <li>• Penyusunan sistem informasi pelaporan konflik yang terintegrasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan sistem tanggap darurat terhadap ancaman keamanan dan konflik sosial;</li> <li>• Penguatan pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat;</li> <li>• Penguatan ketahanan ideologi wawasan kebangsaan di seluruh lapisan masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsolidasi sistem kewaspadaan dini dan pencegahan konflik berkelanjutan;</li> <li>• Pemantapan sinergi antar pemangku kepentingan dalam menjaga kondusivitas;</li> <li>• Penguatan sistem evaluasi capaian kinerja .</li> </ul>

### **3.4 Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029**

Arah kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo disusun berdasarkan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi serta arah kebijakan RPJMD yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra. Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo yaitu:

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra OPD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAK KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		1. Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan mengoptimalkan penegakan perda;	1. Penguatan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan;	
		2. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat;	2. Optimalisasi peran generasi muda sebagai pionir kesadaran berbangsa dengan semangat nasionalisme;	
		3. Penguatan integrasi partai politik;	3. Optimalisasi peran partai politik dan pengembangan etika budaya politik masyarakat, serta membangun sinergitas antar lembaga;	
		4. Penguatan kerukunan antar etnis, agama dan golongan.	4. Penguatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan untuk memperkuat peran ormas dalam pembangunan daerah;	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			5. Optimalisasi peran seluruh elemen masyarakat dalam mengantisipasi bahaya narkoba;	
			6. Optimalisasi peran seluruh elemen masyarakat dalam penguatan nilai-nilai Pancasila dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;	
			7. Optimalisasi peran Forum Kemitraan dalam mendukung kondusivitas wilayah;	
			8. Peningkatan kewaspadaan nasional dan fasilitasi dalam upaya penanganan konflik sosial serta sinergitas antar lembaga;	
			9. Penguatan stabilitas sosial, budaya, dan ekonomi dalam rangka mitigasi antisipasi potensi konflik di daerah;	
			10. Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik, benar dan bersih ( <i>Good Governance</i> ).	

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1 Uraian Program**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

#### **4.2 Uraian Kegiatan**

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas yang dilaksanakan untuk mengimplementasikan program. Kegiatan merupakan bagian dari program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil, barang modal, dan/atau teknologi. Kegiatan memiliki output yang lebih spesifik dibandingkan program dan menjadi komponen penting untuk mengukur keberhasilan program. Kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan sasaran dan tujuan

yang hendak dicapai 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
2. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik;
3. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
4. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pertahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
5. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial;
6. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
7. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
8. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
9. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
10. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah;
11. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

**Tabel. 4.2 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terciptanya Kondisi Masyarakat Yang Tenteram, Tertib, Aman Dan Harmonis	Terciptanya Kondisi Masyarakat Yang Tenteram, Tertib, Aman Dan Harmonis				Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)		
		Meningkatnya Rasa Aman Dan Tenteram di Masyarakat			Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Angka Kriminalitas		
			Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan		Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	<b>PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	
				Terlaksananya Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</li> <li>Jumlah Paskibraka</li> </ul>	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Paskibraka	Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka	
			Meningkatnya Etika Dan Budaya Politik		Persentase Pendidikan Politik Pada Kader Politik	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	
				Terlaksana Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</li> <li>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik,</li> </ul>	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah  • Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan		Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</li> <li>• Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</li> <li>• Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</li> </ul>	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Masyarakat		Persentase Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Kerukunan Pencegahan	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah Yang Dilaksanakan		
				Terlaksana Kegiatan Penunjang Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Kerukunan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</li> <li>• Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</li> <li>• Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan</li> </ul>	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pertahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial Yang Diselesaikan		Persentase Konflik Sosial Yang Diselesaikan	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	
				Terlaksananya Kegiatan Kondusivitas Keamanan, Ketertiban Di Wilayah Dan Ketahanan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</li> <li>Jumlah Orang yang</li> </ul>	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					<p>Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</li> <li>• Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan</li> </ul>		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Daerah Kabupaten/Kota		
					Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah			Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah		
			Tercapainya Kebutuhan Jasa Penunjang Yang Mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintah		Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Umum Dan Kepegawaian Yang Sesuai SOP	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	
				Terlaksananya Kegiatan Penunjang Yang Mendukung Pelaksanaan	• Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Urusan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi</li> </ul>		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</li> <li>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</li> </ul>	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</li> <li>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</li> </ul>	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Kegiatan Penunjang Yang Mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</li> <li>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</li> <li>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang</li> </ul>	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Disediakan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</li> <li>• Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</li> <li>• Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</li> <li>• Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> </ul>		
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Kegiatan Penunjang Yang Mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
				Terlaksananya Kegiatan Penunjang Yang Mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</li> <li>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</li> </ul>	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Kegiatan Penunjang Yang Mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</li> <li>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</li> <li>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</li> <li>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</li> </ul>	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					dibayarkan Pajaknya	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

### 4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Sub kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang lebih rinci dan spesifik. Sub kegiatan merupakan aktivitas operasional yang memiliki tahapan-tahapan pelaksanaan yang lebih detail. Sub kegiatan biasanya merupakan unit terkecil dari hierarki perencanaan dan penganggaran yang memiliki output terukur dan jelas. Sub kegiatan menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran yang lebih detail. Sub kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
2. Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka;
3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
5. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
6. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
7. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,

- Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
8. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
  9. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
  10. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
  11. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
  12. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
  13. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
  14. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;

15. Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
17. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
18. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
19. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
20. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
21. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
22. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
23. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
24. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
25. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
26. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
27. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
28. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
29. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
30. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel;
31. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
32. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
33. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
34. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
35. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
36. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan

37. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan – Meningkatkan Kesadaran masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	CAKUPAN Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	582.526.700	100%	582.526.700	100%	594.177.234	100%	606.060.778	100%	618.181.994,25	
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	582.526.700	100%	582.526.700	100%	594.177.234	100%	606.060.778	100%	618.181.994,25	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	25 Orang	100 Orang	212.526.700	100 Orang	204.177.234	100 Orang	196.060.778	100 Orang	188.181.994	100 Orang	180.545.634	
Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	70 Orang	70 Orang	370.000.000	70 Orang	378.349.466	70 Orang	398.116.456	70 Orang	417.878.784	70 Orang	437.636.360,25	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK – Meningkatkan Etika dan Budaya Politik	PERSENTASE PENDIDIKAN POLITIK PADA KADER POLITIK	100%	100%	2.882.440.000	100%	2.882.440.000	100%	2.940.088.800	100%	2.998.890.576	100%	3.058.868.387,52	
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksana Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan	100%	100%	2.882.440.000	100%	2.882.440.000	100%	2.940.088.800	100%	2.998.890.576	100%	3.058.868.387,52	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik,	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	-	50 Orang	2.882.440.000	50 Orang	2.882.440.000	50 Orang	2.940.088.800	50 Orang	2.998.890.576	50 Orang	3.058.868.387,52	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah												
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang	30 Orang	-	30 Orang	-	30 Orang	54.648.800	30 Orang	113.450.576	30 Orang	173.428.387	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	4 Laporan	4 Laporan	-	4 Laporan	-	4 Laporan	3.000.000	4 Laporan	3.000.000	4 Laporan	3.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah												
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN- Meningkatkan Ketertiban Organisasi Masyarakat</b>	<b>PERSENTASE ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG AKTIF</b>	24	24	279.480.000	24	279.480.000	25	285.069.600	25	290.770.995	25	296.586.411,84	
<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat</b>	<b>Terlaksananya Pemberdayaan Organisasi Masyarakat</b>	24	24	279.480.000	24	279.480.000	25	285.069.600	25	290.770.995	25	296.586.411,84	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas, Pengawasan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing	-	15 Orang	100.000.000	15 Orang	100.000.000	15 Orang	100.000.000	15 Orang	100.000.000	15 Orang	150.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Ormas dan Ormas Asing di Daerah	di Daerah												
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	15 Orang	176.480.000	15 Orang	176.480.000	15 Orang	182.069.600	15 Orang	187.770.992	15 Orang	143.586.411	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan	4 Laporan	3.000.000	4 Laporan	3.000.000	4 Laporan	3.000.000	4 Laporan	3.000.000	4 Laporan	3.000.000	
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA – Meningkatkan ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat</b>	<b>PERSENTASE KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI KERUKUNAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>108.973.300</b>	<b>100%</b>	<b>108.973.300</b>	<b>100%</b>	<b>111.152.766</b>	<b>100%</b>	<b>113.375.821,32</b>	<b>100%</b>	<b>115.643.337,75</b>	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	<b>KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH YANG DILAKSANAKAN</b>												
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pertahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksana Kegiatan Penunjang Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitas Kerukunan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	100%	100%	108.973.300	100%	108.973.300	100%	111.152.766	100%	113.375.821,32	100%	115.643.337,75	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	15 Orang	50.000.000	15 Orang	50.000.000	15 Orang	50.000.000	15 Orang	50.000.000	15 Orang	50.000.000,75	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan	50 Orang	15 Orang	55.973.300	15 Orang	55.973.300	15 Orang	59.152.766	15 Orang	61.375.821	15 Orang	63.643.337	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah												
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	4 Laporan	3.000.000	4 Laporan	3.000.000	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000	
<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL – Meningkatnya</b>	<b>PERSENTASE KONFLIK SOSIAL YANG DISELESAIKAN</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.559.100.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.559.100.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.590.282.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.622.087.640</b>	<b>100%</b>	<b>1.654.529.392,8</b>	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
penanganan konflik sosial yang diselesaikan													
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Kegiatan Kondusivitas Keamanan, Ketertiban Di Wilayah Dan Ketahanan Nasional	100%	100%	1.559.100.000	100%	1.559.100.000	100%	1.590.282.000	100%	1.622.087.640	100%	1.654.529.392,80	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	15 Orang	1.100.000.000	15 Orang	1.100.000.000	15 Orang	1.100.000.000	15 Orang	1.100.000.000	15 Orang	1.100.000.000,8	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	20 Orang	15 Orang	241.100.000	15 Orang	241.100.000	15 Orang	272.282.000	15 Orang	304.087.640	15 Orang	336.529.392	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah												
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	4 Laporan	3.000.000	4 Laporan	3.000.000	4 Laporan	3.000.000	4 Laporan	3.000.000	4 Laporan	3.000.000	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	11 Dokumen	12 Dokumen	215.000.000	12 Dokumen	215.000.000	12 Dokumen	215.000.000	12 Dokumen	215.000.000	12 Dokumen	215.000.000	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>PERSENTASE CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERENCANAAN, KEUANGAN, UMUM DAN KEPEGAWAIAN</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>3.937.030.399</b>	<b>95%</b>	<b>4.015.771.006,98</b>	<b>95%</b>	<b>4.116.165.282,15</b>	<b>95%</b>	<b>4.219.069.414,21</b>	<b>95%</b>	<b>4.282.355.455,42</b>	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	<b>YANG SESUAI SOP</b>												
<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Penunjang Yang Mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintah</b>	95%	95%	11.974.000	95%	12.974.000	95%	13.974.000	95%	14.974.000	95%	15.974.000	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	6.235.000	3 Dokumen	6.735.000	3 Dokumen	7.235.000	3 Dokumen	7.735.000	3 Dokumen	8.235.000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.739.000	1 Laporan	6.239.000	1 Laporan	6.739.000	1 Laporan	7.239.000	1 Laporan	7.739.000	
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Penunjang Yang Mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintah</b>	95%	95%	3.400.000.000	95%	3.475.000.000,98	95%	3.550.000.000,15	95%	3.640.000.000,21	95%	3.710.000.000,42	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang	29 Orang	3.303.784.000	30 Orang	3.377.284.000,98	31 Orang	3.451.784.000,15	32 Orang	3.550.784.000,21	33 Orang	3.610.284.000,42	
Sub Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	90.227.000	12 Dokumen	91.227.000	12 Dokumen	91.727.000	12 Dokumen	92.227.000	12 Dokumen	92.727.000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.989.000	1 Laporan	6.489.000	1 Laporan	6.489.000	1 Laporan	6.989.000	1 Laporan	6.989.000	
<b>Kegiatan</b>	<b>Terlaksananya</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>176.200.000</b>	<b>95%</b>	<b>176.200.000</b>	<b>95%</b>	<b>176.200.000</b>	<b>95%</b>	<b>176.200.000</b>	<b>95%</b>	<b>176.200.000</b>	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kegiatan Penunjang Yang Mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintah</b>												
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	21 Pakaian	30 Pakaian	24.000.000	30 Pakaian	24.000.000	30 Pakaian	24.000.000	30 Pakaian	24.000.000	30 Pakaian	24.000.000	
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	29 Pegawai	30 Pegawai	152.200.000	30 Pegawai	152.200.000	30 Pegawai	152.200.000	30 Pegawai	152.200.000	30 Pegawai	152.200.000	
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Penunjang Yang Mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintah</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>229.417.000</b>	<b>95%</b>	<b>229.417.000</b>	<b>95%</b>	<b>229.417.000</b>	<b>95%</b>	<b>229.417.000</b>	<b>95%</b>	<b>229.417.000</b>	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	12 Paket	7.217.000	12 Paket	7.217.000	12 Paket	7.217.000	12 Paket	7.217.000	12 Paket	7.217.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	20.000.000	2 Paket	20.000.000	2 Paket	20.000.000	2 Paket	20.000.000	2 Paket	20.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.000.000	1 Paket	2.000.000	1 Paket	2.000.000	1 Paket	2.000.000	1 Paket	2.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Paket	28 Paket	130.000.000	28 Paket	130.000.000	28 Paket	130.000.000	28 Paket	130.000.000	28 Paket	130.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang	Jumlah Paket Barang Cetak dan	4 Paket	12 Paket	13.300.000	12 Paket	13.300.000	12 Paket	13.300.000	12 Paket	13.300.000	12 Paket	13.300.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Cetakan dan Penggandaan	Penggandaan yang disediakan												
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen	12 Dokumen	16.900.000	12 Dokumen	16.900.000	12 Dokumen	16.900.000	12 Dokumen	16.900.000	12 Dokumen	16.900.000	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	40.000.000	
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Penunjang Yang Mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintah</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>20.000.000</b>	<b>95%</b>	<b>20.000.000</b>	<b>95%</b>	<b>20.000.000</b>	<b>95%</b>	<b>20.000.000</b>	<b>95%</b>	<b>20.000.000</b>	
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	20.000.000	2 Paket	20.000.000	2 Paket	20.000.000	2 Paket	20.000.000	2 Paket	20.000.000	
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Penunjang Yang Mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintah</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>46.000.000</b>	<b>95%</b>	<b>46.000.000</b>	<b>95%</b>	<b>46.000.000</b>	<b>95%</b>	<b>46.000.000</b>	<b>95%</b>	<b>46.000.000</b>	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	4.000.000	2 Laporan	4.000.000	2 Laporan	4.000.000	2 Laporan	4.000.000	2 Laporan	4.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12.000.000	12 Laporan	12.000.000	12 Laporan	12.000.000	12 Laporan	12.000.000	12 Laporan	12.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	30.000.000	
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Penunjang</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>53.439.399</b>	<b>95%</b>	<b>56.180.006</b>	<b>95%</b>	<b>80.574.282</b>	<b>95%</b>	<b>82.478.414</b>	<b>95%</b>	<b>84.764.455</b>	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
<b>Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Yang Mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintah</b>												
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Kendaraan	3 Kendaraan	47.439.399	3 Kendaraan	49.180.006	3 Kendaraan	72.574.282	3 Kendaraan	72.478.414	3 Kendaraan	74.764.455	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Kendaraan	15 Kendaraan	3.000.000	15 Kendaraan	3.000.000	15 Kendaraan	3.000.000	15 Kendaraan	3.000.000	15 Kendaraan	3.000.000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Peralatan	15 Peralatan	2.000.000	15 Peralatan	3.000.000	15 Peralatan	4.000.000	15 Peralatan	6.000.000	15 Peralatan	6.000.000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	-	1 Gedung	1.000.000	1 Gedung	1.000.000	1 Gedung	1.000.000	1 Gedung	1.000.000	1 Gedung	1.000.000	

#### 4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah bagian dari kegiatan yang lebih rinci dan spesifik yang menjadi prioritas 5 (lima) tahun kedepan. Sub kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
2. Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka;
3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
5. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
6. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
7. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
8. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi

- Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
9. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
  10. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
  11. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
  12. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
  13. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
  14. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
  15. Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
1	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka	
	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>MENINGKATNYA KETERTIBAN ORGANISASI MASYARAKAT</b>	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>MENINGKATNYA KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA MASYARAKAT</b>	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pertahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>MENINGKATNYA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL YANG DISELESAIKAN</b>	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
			Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	

#### 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 merupakan komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas, berkelanjutan, dan berkeadilan. Keberhasilan ini tidak hanya diukur dari pencapaian target kuantitatif, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

Pencapaian target memerlukan komitmen yang konsisten dari seluruh stakeholder, mulai dari level pimpinan hingga pelaksana di lapangan. Budaya kinerja tinggi, inovasi berkelanjutan, dan orientasi pada kepuasan masyarakat menjadi nilai-nilai fundamental yang harus dihayati oleh setiap individu dalam organisasi.

Dengan pendekatan yang sistematis, terukur, dan adaptif, target keberhasilan Renstra 2025-2029 bukan hanya sekedar angka yang harus dicapai, tetapi merupakan langkah konkret dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Setiap pencapaian target di level perangkat daerah merupakan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) perangkat daerah terlampir sebagai berikut:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Angka	76,47	76,52	76,70	77	77,20	77,50	
2.	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Angka	84,92	85	85,08	85,16	85,24	85,32	
3.	Angka Kriminalitas	Angka	26,08	25,56	25,05	24,54	24,03	23,52	

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>									
1.	Angka Kriminalitas	Angka	26,08	25,56	25,05	24,54	24,03	23,52	
<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)</b>									
2.	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Angka	84,92	85	85,08	85,16	85,24	85,32	
3.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Angka	76,47	76,52	76,70	77	77,20	77,50	

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra ini merupakan Rencana Strategis jangka menengah sesuai kurun waktu perwujudannya mencakup 5 (lima) tahun kedepan yaitu mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Sedangkan untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut telah ditetapkan ke dalam program. Untuk pelaksanaan selanjutnya akan dituangkan dalam kegiatan dari masing-masing program ke dalam bentuk kegiatan dari masing-masing program ke dalam bentuk kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan rencana jangka pendek sesuai dengan indikator- indikator kinerja yang akan direalisasikan dalam kurun waktu tahun 2021 sebagai rencana kerja tahun pertama.

Tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 – 2029 akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan maupun lima tahunan yang berorientasi akuntabilitas dan transparansi, terutama dalam peningkatan pendapatan daerah dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah.

Dengan adanya Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo tahun 2025 – 2029 diharapkan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan dalam tahun tersebut akan lebih sinergis khususnya dengan program / kegiatan Pusat, Provinsi dan Kabupaten serta Stakeholder.